

Laporan Keuangan Instansi Bermasalah

● Hasil Pemeriksaan BPK

SEMARANG - Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, masih banyak laporan keuangan yang bermasalah di provinsi ini.

Permasalahan diketahui dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Dari 24 LHP yang kami periksa, yakni 10 pemeriksaan kinerja dan 14 pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ternyata masih ada yang bermasalah. Itu berasal dari pemeriksaan di sejumlah instansi," ungkap Kepala BPK Perwakilan Jateng Cris Kuntadi di sela-sela acara penyerahan LHP, Senin (22/12).

Pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK memeriksa operasional Bank Jateng di Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Pekalongan, dan Jakarta.

Kemudian operasional RSUD Margono dan RSUD Kudus Kabupaten Kudus, belanja Pemerintah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Blora, Kebumen, Kota Pekalongan, Batang, Brebes, Pemalang, dan belanja atas barang dan jasa Kota Magelang.

Terakhir, pengelolaan aset Kabupaten Wonogiri dan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng.

Cris menjelaskan, dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja daerah, pihaknya menemukan beberapa hal yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Antara lain, perencanaan pelaksanaan kegiatan belum memadai, rencana umum pengadaan (RUP) disusun tidak tepat waktu, volume pekerjaan dalam kontrak tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kemudian, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi tek-

nis, pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak mendokumentasikan administrasi proyek secara tertib, kelebihan uang harian perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban tidak didukung bukti yang sah.

"Misalnya pada pemeriksaan terhadap KPU masih ditemukan kelebihan biaya perjalanan dinas di atas standar biaya umum, pembayaran honorarium tidak sesuai standar tarif dan tidak layak dibayarkan, dan pajak belum dipungut atau belum disetor ke kas negara.

Di Bank Jateng, bank tersebut belum memberikan data yang lengkap atas rekening kas daerah kepada pemerintah daerah, persentase honorarium Dewan Komisaris melebihi ketentuan peraturan Bank Indonesia.

Kemudian, kredit proyek kepada PT Bum dengan plafon Rp 50 miliar digunakan tidak sesuai persetujuan kredit sebesar Rp 27,9 miliar, perpanjangan waktu melebihi ketentuan direksi, dan lainnya," urai Cris. **Harus Diperbaiki**

Selain KPU dan Bank Jateng, dari hasil LHP RSUD Margono dan RSUD Kudus juga ditemukan masalah seperti perencanaan dan penyusunan harga perkiraan pengadaan alat kedokteran umum tidak dilakukan secara cermat, dan kesalahan perhitungan *contract change order* yang berpotensi kelebihan pembayaran.

Adapun dalam pengelolaan aset di Pemkab Wonogiri, BPK menemukan penilaian aset tetap belum tepat, kartu inventaris



SM/Anggun Puspita

SERAHKAN LHP: Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Cris Kuntadi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Gubernur Ganjar Pranowo, Senin (22/12). (30)

barang yang digunakan sebagai dasar penyajian nilai aset tetap di neraca daerah tidak sesuai kondisi sebenarnya.

"Di samping pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kami juga memeriksa kinerja penyediaan air bersih di PDAM, seperti belum menyediakan air bersih yang memadai dan

belum sepenuhnya mengendalikannya biaya usaha dengan baik," katanya.

Cris menambahkan, pihaknya memberi waktu 60 hari kepada instansi/lembaga tersebut untuk memperbaiki laporan keuangan.

"Kami akan pantau terus perbaikan laporan tersebut,"

tandasnya.

Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno mengatakan, permasalahan yang terjadi di instansinya bukan kesengajaan.

"Kan masih ada waktu dua bulan. Kesempatan itu akan kami gunakan untuk memperbaiki laporan," katanya. (K3-59)